



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 182 Telp (0742) 21192 Fax. 322620

KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 19 Maret 2019

Nomor : 050/531/PBJ
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Percepatan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Kepada Yth,
Sdr. Pimpinan Kepala OPD
dilingkungan Pemkab. Tanjab Barat
di -

TEMPAT

DASAR : 1. Surat edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Sehubungan dengan Tindak lanjut Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agar penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut:
 - a. Memastikan Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah (Satker/OPD) menyusun dan mengumumkan RUP untuk seluruh belanja pengadaan.
 - b. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SiRUP.
 - c. Melakukan kembali penyusunan dan pengumuman RUP dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - d. Melakukan konsolidasi pengadaan berdasarkan RUP di Satker/OPD maupun antar Satker/OPD.
 - e. Mendorong terintegrasinya sistem penganggaran dengan SiRUP sehingga mempermudah penyusunan dan pengumuman RUP.
 - f. Melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP melalui aparaturnya pengawasan intern pemerintah.
2. Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pencatatan atas hasil pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan instalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3 bagi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda yang belum melaksanakan
 - b. Mendorong dan mengkampanyekan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) pada proses Tender dan Non Tender berbasis SPSE Versi 4.3 kepada pelaku usaha dan asosiasi perusahaan
 - c. Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi data kualifikasi pelaku usaha yang akan tercantum dalam SIKaP.
 - d. Menggunakan aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3 untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
 - e. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan katalog elektronik, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik.
 - f. Melaksanakan pencatatan nilai kontrak pada aplikasi e-Kontrak SPSE Versi 4.3 untuk seluruh pengadaan, baik melalui Tender maupun Non Tender.
3. Hal - hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain:
 - a. Pembelian secara e-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberikan kesempatan kepada pelaku

- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri.
- b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik pemerintah maka pelaksanaan pengadaan dilakukan menggunakan metode pemilihan penyedia selain e-purchasing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


An. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIS DAERAH
Drs. H. AMBOK TUO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 009

TANDA TERIMA SURAT KELUAR UMUM
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA TANJAB BARAT TAHUN 2019

Nomor : 050/531/PBJ

Tanggal : 19 Maret 2019

Perihal : Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO.	SKPD	NAMA	TANDA/TANGAN
1	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	REDA	[Signature]
2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEAGAAM	Lia	[Signature]
3	BAGIAN HUKUM	REDA	[Signature]
4	BAGIAN KOMUNIKASI DAN DOKUMENTASI	Dani	[Signature]
5	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	Eca	[Signature]
6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Sika	[Signature]
7	BAGIAN ORGANISASI	Habibah	[Signature]
8	BAGIAN UMUM	Endang	[Signature]
9	BAGIAN SAPRAS	Salsan	[Signature]
10	BAGIAN PEREKONOMIAN	AMS	[Signature]
11	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL ✓		
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	edo	[Signature]
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAPENDA	gustiniati	[Signature]
14	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Badan Pendapatan Daerah	Kiki	[Signature]
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	ASLINA	[Signature]
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rafli	[Signature]
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	Jimmy	[Signature]
18	INSPEKTORAT	Scarl	[Signature]
19	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Laili partomita	[Signature]
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	[Signature]	[Signature]
21	DINAS KESEHATAN	[Signature]	[Signature]
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	[Signature]	[Signature]
23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	MUBA	[Signature]
24	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Ayu	[Signature]
25	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Nurul	[Signature]
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Windy	[Signature]
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	IPAN	[Signature]
28	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	masnich	[Signature]
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Hareanto	[Signature]
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	Bambang	[Signature]
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ELDA.MY	[Signature]
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Siti Habibah	[Signature]
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	Dita putri	[Signature]
34	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	ARDI RANI	[Signature]
35	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nabila	[Signature]
36	DINA SOSIAL	HITRI	[Signature]
37	DINAS TENAGA KERJA	Anip	[Signature]
38	DINAS PERHUBUNGAN	TOMI	[Signature]
39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	RPIK	[Signature]
40	DINAS PERIKANAN	Prima	[Signature]
41	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	SARI	[Signature]